

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai pemahaman bagaimana efektivitas kebijakan ketahanan pangan telah diteliti sebelumnya. Putri & santoso (2022), meneliti tentang *“efektivitas program ketahanan pangan di kabupaten grobogan”*, menemukan bahwa keberhasilan kebijakan ketahanan pangan sangat di pengaruhi oleh faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kemandirian lokal. Penelitian ini relevan dengan konteks Mukomuko karena menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan.

Penelitian oleh Siti Nurjanah (2021), berjudul *“Efektivitas Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman”* menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam distribusi pangan di beberapa wilayah. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas efektivitas kebijakan ketahanan pangan pada tingkat daerah.

Penelitian oleh Ahmad Fauzi (2020), penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyumas”* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian

ini menekankan pentingnya ketepatan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan program pangan.

Sejalan dengan itu ada penelitian oleh Dewi Kartika (2019), yang berjudul *“Analisis Ketahanan Pangan Daerah Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan”* menjelaskan bahwa tingginya nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dipengaruhi oleh faktor ketersediaan pangan, akses pangan, dan stabilitas pangan. Penelitian ini relevan karena menggunakan indikator IKP sebagai dasar dalam melihat kondisi ketahanan pangan daerah.

Kemudian, Penelitian terdahulu yang juga relevan di lakukan oleh Rina Susanti (2022) Penelitian yang berjudul *“Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Barat”* menyatakan bahwa efektivitas kebijakan dapat dilihat dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pangan cukup efektif, namun masih diperlukan peningkatan dalam pengawasan dan pemerataan program. Penelitian ini relevan karena menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik.

Terakhir, penelitian oleh Andi Pratama (2023), Penelitian berjudul *“Efektivitas Program Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”* menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Penelitian ini relevan karena menyoroti hubungan antara efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan

pangan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, baik dari aspek efektivitas, koordinasi kelembagaan, distribusi pangan, maupun partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada lokasi dan konteks yang berbeda, serta belum secara khusus mengkaji efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko yang memiliki capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian dengan menitikberatkan pada analisis efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 berdasarkan indikator kebijakan yang komprehensif serta dikaitkan dengan capaian IKP daerah.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Riant Nugroho (2018), kebijakan publik adalah keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik melalui serangkaian proses yang sistematis, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Kebijakan publik tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sejalan dengan itu, Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*What Government Chooses To Do Or Not To Do*). Pandangan ini

menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup seluruh tindakan maupun ketidak-tindakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Selanjutnya, James E. Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh aktor pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan harus memiliki arah yang jelas serta didukung oleh implementasi yang konsisten agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada proses pelaksanaannya.

George C. Edwards III menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan yang baik, tetapi juga oleh faktor implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Artinya, kebijakan yang dirancang dengan baik belum tentu efektif apabila tidak didukung oleh implementasi yang optimal. Oleh karena itu, analisis efektivitas kebijakan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan.

Selain itu, William N. Dunn (2003) menambahkan bahwa kebijakan publik harus dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan karena dapat memberikan informasi mengenai

keberhasilan maupun kelemahan kebijakan. Dalam hal ini, efektivitas menjadi salah satu kriteria utama dalam menilai keberhasilan kebijakan publik.

Konsep kebijakan publik dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai produk keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan dan aktor, serta harus dievaluasi untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 dapat dianalisis sebagai suatu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pangan melalui proses kebijakan yang terstruktur, yang pada akhirnya dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.2 Teori efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2018)

Efektivitas kebijakan publik merupakan ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Pandangan tersebut diperkuat oleh William N. Dunn (2003) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan salah satu kriteria utama dalam evaluasi kebijakan publik, yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil kebijakan mampu menyelesaikan masalah publik. Dunn menekankan bahwa efektivitas berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan kebijakan, sehingga semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, maka semakin efektif kebijakan tersebut.

Selain itu, Richard M. Steers (1985) menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan atau organisasi dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi

(*adaptation*). Dalam konteks kebijakan publik, pencapaian tujuan berkaitan dengan hasil kebijakan, integrasi berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, sedangkan adaptasi berkaitan dengan kemampuan kebijakan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

Lebih lanjut, George C. Edwards III (1980) menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasinya. Ia mengemukakan empat faktor utama yang menentukan efektivitas kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Apabila keempat faktor tersebut berjalan dengan baik, maka kebijakan yang diimplementasikan cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya, James E. Anderson (1979) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik berkaitan erat dengan sejauh mana kebijakan mampu memberikan manfaat bagi kelompok sasaran (*target group*). Artinya, kebijakan tidak hanya dinilai dari keberhasilannya secara administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat.

Menurut Riant Nugroho (2018), efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat dari *output* yang dihasilkan, tetapi juga dari *outcome* atau dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, suatu kebijakan dikatakan efektif apabila mampu memberikan perubahan yang signifikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam berbagai aspek, mulai dari perumusan

hingga implementasi kebijakan. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas kebijakan, diperlukan indikator yang mampu menggambarkan apakah kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada di masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori dari Riant Nugroho (2018) digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2025. Melalui kelima indikator tersebut, peneliti dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan telah tepat dalam menjawab permasalahan ketahanan pangan serta mampu meningkatkan kondisi pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam teorinya, Riant Nugroho (2018) mengemukakan lima indikator utama efektivitas kebijakan publik, yaitu:

a. Tepat kebijakan

Tepat kebijakan merupakan indikator efektivitas kebijakan publik yang menunjukkan bahwa suatu kebijakan harus sesuai dengan masalah publik yang ingin diselesaikan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Kebijakan yang efektif tidak hanya dibuat berdasarkan kepentingan pemerintah, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan situasi di lapangan agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kesesuaian kebijakan dengan masalah publik menjadi penting agar kebijakan benar-benar menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, ketepatan tujuan kebijakan diperlukan

supaya arah kebijakan jelas dan hasil yang ingin dicapai dapat terukur. Relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi aspek utama karena kebijakan harus memberikan manfaat langsung bagi kelompok sasaran. Di samping itu, kejelasan arah dan substansi kebijakan diperlukan agar isi kebijakan mudah dipahami dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.

b. Tepat pelaksanaan

Tepat Pelaksana dalam efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2018), menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh pihak yang menjalankan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi yang baik agar mampu memahami tujuan serta mekanisme pelaksanaan program secara tepat. Selain itu, kejelasan pembagian tugas dan wewenang juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antar pelaksana. Dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar lembaga menjadi aspek penting untuk menciptakan kerja sama yang efektif sehingga program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, komitmen dan tanggung jawab pelaksana sangat diperlukan sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan kebijakan demi tercapainya hasil yang optimal bagi masyarakat.

c. Tepat target

Tepat Target dalam efektivitas kebijakan publik menekankan bahwa suatu kebijakan harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Ketepatan target terlihat dari kemampuan pemerintah dalam menentukan kelompok sasaran yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan penerima manfaat secara nyata. Selain itu, distribusi manfaat kebijakan harus dilakukan secara adil dan merata agar tidak terjadi penyimpangan maupun ketidaktepatan penerima bantuan atau layanan. Dengan minimnya kesalahan sasaran dalam implementasi, kebijakan akan lebih efektif, mampu mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Tepat lingkungan

Tepat lingkungan menunjukkan bahwa suatu kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan masyarakat tempat kebijakan tersebut diterapkan. Lingkungan yang dimaksud meliputi kondisi sosial masyarakat, dukungan politik dan birokrasi, keadaan ekonomi, serta budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Kesesuaian dengan kondisi sosial masyarakat penting agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan sesuai kebutuhan publik. Dukungan lingkungan politik dan birokrasi juga sangat menentukan karena

pelaksanaan kebijakan memerlukan koordinasi, komitmen, dan stabilitas dari lembaga pemerintah. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat harus diperhatikan agar kebijakan tidak memberatkan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara realistis. Penerimaan budaya terhadap kebijakan juga menjadi aspek penting karena nilai, kebiasaan, dan budaya masyarakat dapat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang mampu menyesuaikan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya akan lebih mudah mencapai tujuan secara efektif.

e. Tepat proses

Tepat proses menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan harus berjalan sesuai prosedur, mekanisme, dan aturan yang telah ditetapkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Kejelasan prosedur pelaksanaan menjadi hal penting karena memberikan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, transparansi pelaksanaan kebijakan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui proses pelaksanaan program secara terbuka sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik. Dalam pelaksanaannya juga dibutuhkan pengawasan dan evaluasi program untuk menilai keberhasilan maupun hambatan yang terjadi selama implementasi kebijakan berlangsung. Di samping itu, konsistensi pelaksanaan sesuai aturan menjadi faktor penting agar kebijakan tetap

berjalan sesuai tujuan awal tanpa adanya penyimpangan dalam proses implementasinya.

Kelima indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam menilai efektivitas kebijakan publik. Apabila seluruh indikator tersebut terpenuhi, maka kebijakan dapat dikatakan berjalan secara efektif.

Dengan mengacu pada berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan publik merupakan konsep yang multidimensional, yang mencakup pencapaian tujuan, keberhasilan implementasi, dampak terhadap masyarakat, serta kemampuan kebijakan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Dalam penelitian ini, efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 akan dianalisis berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan masyarakat, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3 Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu, baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, maupun keterjangkauannya secara berkelanjutan. Menurut *Food and Agriculture Organization*, ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama yaitu ketersediaan pangan (*Availability*), akses pangan (*Access*), pemanfaatan pangan (*Utilization*), dan stabilitas pangan (*Stability*). Keempat dimensi ini

menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu wilayah telah mencapai kondisi ketahanan pangan yang baik.

Konsep ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga pada distribusi dan konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Dalam hal ini, ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mengatur sistem pangan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan publik yang diterapkan.

Sementara itu, William N. Dunn (2003) menekankan bahwa suatu kebijakan dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat.

George C. Edwards III juga menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses implementasinya, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ketahanan pangan, implementasi kebijakan yang tidak optimal dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pangan, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara maksimal.

Selanjutnya, Richard M. Steers menjelaskan bahwa efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana suatu organisasi atau kebijakan mampu mencapai tujuan melalui integrasi dan adaptasi terhadap lingkungan. Dalam kaitannya

dengan ketahanan pangan, kebijakan yang efektif harus mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat di daerah, seperti Kabupaten Mukomuko yang memiliki karakteristik wilayah pertanian dan pesisir.

Konsep ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari efektivitas kebijakan publik. Ketahanan pangan yang baik merupakan hasil dari kebijakan yang dirancang secara tepat, diimplementasikan secara optimal, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, ketahanan pangan tidak hanya dilihat sebagai kondisi akhir, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks ketahanan pangan merupakan alat ukur komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan kondisi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan dalam suatu daerah. Pengukuran indeks ketahanan pangan menjadi penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih objektif terkait kondisi pangan masyarakat serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran (BKP, 2019).

Indeks ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi ketahanan pangan di suatu daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pangan oleh pemerintah (Mintarja, 2019). Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk menilai sejauh

mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Indeks ini tidak hanya melihat aspek produksi pangan, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan serta kualitas konsumsi pangan itu sendiri. Dengan demikian, indeks ketahanan pangan bersifat multidimensional dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja.

Indeks ketahanan pangan biasanya disusun berdasarkan beberapa indikator utama seperti rasio ketersediaan pangan, tingkat kemiskinan, akses terhadap infrastruktur, serta tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat (Ilham & Siregar, 2006). Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur kondisi riil ketahanan pangan di suatu wilayah sehingga dapat diketahui daerah mana yang tergolong tahan pangan dan daerah yang masih rentan.

Lebih lanjut, hasil pengukuran indeks ketahanan pangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti sangat tahan pangan, tahan pangan, rentan, dan rawan pangan. Klasifikasi ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas intervensi kebijakan, terutama dalam upaya penanggulangan kerawanan pangan. Dengan adanya indeks ini, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi permasalahan dan menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko

Tahun 2025. Apabila nilai indeks menunjukkan peningkatan, maka dapat diindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila indeks menunjukkan penurunan atau stagnasi, maka diperlukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.

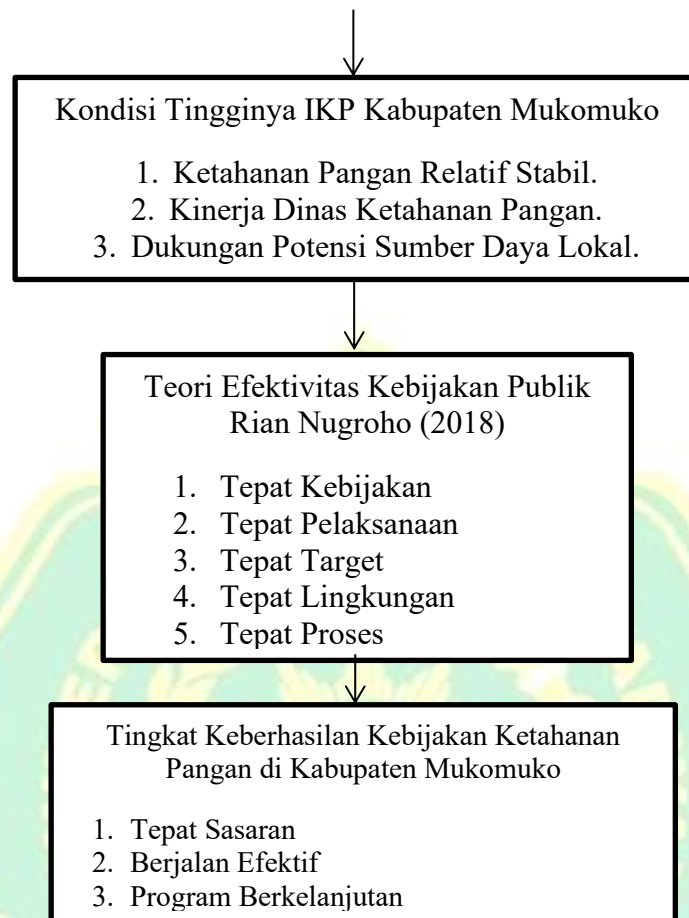
Dengan demikian, Indeks Ketahanan Pangan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan publik di bidang pangan. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa penggunaan indeks ketahanan pangan mampu membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran (Hasyim et al., 2017).

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur analisis efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2025. Penelitian diawali dari adanya kebijakan daerah, yaitu Perbup Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan program ketahanan pangan. Kebijakan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan, yaitu tingginya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Mukomuko yang menunjukkan kondisi pangan yang relatif baik.

Selanjutnya, kondisi tersebut dianalisis menggunakan teori efektivitas kebijakan publik dari Riant Nugroho (2018) dengan lima indikator utama. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan ketahanan pangan, apakah sudah berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Perbup Kabupaten Mukomuko
Nomor 35 Tahun 2017



Sumber:Peneliti,(2026)